

**PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

OLEH
REFNI JUNIFWI BOUTI
E11.16.117

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

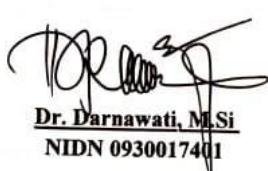
OLEH
REFNI JUNIFWI BOUTI
E11.16.117

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dan
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 11 Mei 2020**

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Darnawati, M.Si
NIDN 0930017401

Pembimbing II



Fitrianti, SE., M.Ak
NIDN 0901129001

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA

OLEH
REFNI JUNIFWI BOUTI
E11.16.117

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Juli 2020

Komisi Penguji :

1. Reyther Biki, SE., M.Si
2. Rahma Rizal, SE. Ak., M.Si
3. Afriana Lomagio, SE., M.Ak
4. Dr. Darnawati, M.Si
5. Fitrianti, SE, M.Ak

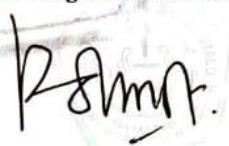
Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. ARIAWAN, S.Psi., SE., MM
NIDN 0922057502



RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si
NIDN 0914027902

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagsan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 11 April 2020

Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puja, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang telah melengkapkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penlitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna menempuh ujian pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah memperjuangkan agama islam dan ajarannya didunia oni yang dikenang dan diamalkan sampai akhir zaman nanti.

Dengan selesainya usulan penelitian ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari Pembimbing dan Anggota serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggungjawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan baik moral dan material, nasehat, doa, pengorbanan serta kasih sayang yang takkan terganti oleh siapapun.

Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak., C.Sr. Selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak

Dr. Abdul Gaffar La Tjoke, M.Si. Selaku Rektor Universitan Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Ariawan SE., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Dr. Darnawati S.Pd., M.Si selaku pembimbing Idan, Ibu Fitrianti, SE., M.Ak, selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan hasil penelitian ini, Bapak Ibu dosen dan seluruh staf administrasi pada Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, atas segala bimbingan arahan ilmu serta bantuannya kepada penulis.

Dalam penyusunan usulan penelitian ini, penulis banyak mengalami kesulitas dan hambatan, namun berkat limpahan Rahmat dan Petunjuk dari Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan usulan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan usulan penelitian ini di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga segala bantuan serta petunjuk yang telah diberikan akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Wasalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo,

2020

Refni Junifwi Bouti

ABSTRAK

Refni Junifwi Bouti, 2020. Nim: E.111.16.17. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap pengelolaan Keuangan daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Dibimbing Oleh Pembimbing 1 ibu Dr. Darnawati S.Pd, M.Si dan Pembimbing 2 ibu Fitrianti S.E, M.Ak.

Tujuan penelitian untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah pada badan keuangan kebupaten gorontalo utara. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan sampel berjumlah 20 orang dari jumlah populasi 39 orang dari PNS Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan regresi sederhana dengan serangkaian pengujian statistik.

Hasil penelitian secara keseluruhan yaitu variabel X Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada variabel Y pengelolaan keuangan daerah, Hasil menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) atas pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 62,8%. Artinya akuntabilitas memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, sementara sisanya 0,372 atau 37,2% berupa kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dan di desain dalam penelitian ini.

Kata kunci : Akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah

DAFTAR ISI

Teks	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.1.1 Definisi Akuntabilitas	7
2.1.2 Dimensi akuntabilitas.....	9
2.1.3 Definisi pengelolaan keuangan daerah.....	12
2.1.4 Prinsip pengelolaan keuangan daerah	13
2.1.5 Asas-asas pengelolaan keuangan daerah	15
2.1.6 Pelaku pengelolaan keuangan daerah	17
2.1.7. Penelitian Terdahulu.....	18

2.2 Kerangka Pemikiran.....	20
2.3. Hipotesis.....	22

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian	24
3.2 Metode Penelitian.....	24
3.3 Populasi Dan Sampel	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Teknik Analisis Data.....	32
3.6 Hipotesis Statistika.....	36

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN HASIL

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran lokasi tempat penelitian	37
4.2 Visi Misi.....	37
4.3 Struktur Organisasi	41
4.4 Hasil Penelitian.....	43
4.5 Hasil Analisis Data.....	45
4.6 Pembahasan.....	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Teks	Halaman
1. Penelitian terdahulu.....	18
2. Operasional Variabel.....	26
3. Bobot Nilai Variabel.....	28
4. Responden.....	29
5. Deskripsi Responden.....	43
6. Uji validitas akuntabilitas (X).....	44
7.Uji validitas pengelolaan keuangan daerah (Y).....	44
8. Hasil uji reliabilitas.....	45
9. Hasil pengujian Normalitas data.....	46
10. Hasil koefisien regresi.....	48
11. Pengujian model regresi.....	50
12. Hasil pengujian hipotesis.....	51
13. Hasil Koefisien Korelasi dan determinasi.....	53

DAFTAR GAMBAR

Teks	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	22
2. Desain Penelitian.....	24
3. Hasil Pengujian Normalitas.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Teks	Halaman
1. Kuisioner Penelitian	61
2. Data Penelitian	65
3. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian.....	67
4. Hasil Uji Normalitas.....	71
5. Hasil Output SPSS.....	74
6. R Tabel.....	76
7. F Tabel.....	77
8. T Tabel.....	78
9. Surat Lemlit	79
10. Surat Rekomendasi Penelitian (Kesbangpol)	80
11. Surat Keterangan Tempat Penelitian	81
12. Surat Bebas Plagiasi	82
13. Surat Pernyataan	83
14. Hasil Turnitin.....	84

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik adalah sebuah sistem akuntansi yang selalu dipakai oleh lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Kewajiban lembaga publik ini memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan uang publik terhadap pihak yang memiliki hak serta kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Lembaga publik ini mendapat tuntutan dari semua masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas, transparansi, serta bertanggungjawab. Di era reformasi saat ini pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai macam perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan sebuah rakaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan suatu tata kelola yang baik dan benar. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tersebut tidak terlepas dari berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu bentuk keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah

yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah ini harus di kelola dengan tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan berbagai asas keadilan, kepatuhan, serta manfaat untuk masyarakat itu sendiri.

Aspek penting yang harus dipertimbangkan di dalam setiap pengelolaan keuangan daerah adalah suatu legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan keuangan secara baik, perlindungan terhadap aset fisik dan finansial, serta mencegah terjadinya pemborosan aset dan salah urus. Berdasarkan pandangan tersebut, baik dalam pemrintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan di dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat, dengan misi penting adalah peningkatan efisiensi serta efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat tersebut.

Stanbury, 2006 “Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic”.

Selain akuntabilitas keuangan, pengawasan juga memberikan pengaruh lebih

terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana pengawasan tersebut merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk bisa menjamin agar pemerintah selaku pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun itu sudah berjalan dengan efisien, efektif, serta ekonomis atau belum. Selain itu, dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pemerintah diwajibkan harus bisa terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Keterbukaan informasi yang didapat serta keterlibatan publik didalam pengelolaan keuangan adalah awal baik perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah serta rencana pembangunan pada berbagai tingkat.

Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu bisa memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh di dalam laporan keuangan tersebut akan menciptakan pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan dapat berimplikasi terhadap peningkatan sebuah pengelolaan keuangan yang baik.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah merupakan media yang sangat penting, karena kita bisa mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.

Namun, kenyataannya di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, akuntabilitas atau tanggung jawab dari pengelolaan keuangan daerah masih belum dikatakan efektif. Oleh sebab itu, kita masih harus lebih teliti lagi dalam

memperhatikan bagaimana akuntabilitas atau tanggungjawab itu sendiri agar bisa sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Peneliti tertarik melakukan penelitian di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, karena bidang tersebut bergerak di bidang keuangan yang mengatur keuangan dari bidang Assets, bidang Akuntansi hingga bidang yang mengatur tentang Pajak serta Piutang yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Dari hasil penelitian ini juga telah terbukti bahwa untuk subjek yang memiliki akuntabilitas tinggi, setiap salam mengambil tindakannya harus lebih berdasarkan pada alasan-alasan yang lebih rasional dan tidak hanya semata-mata hanya berdasarkan kepada sesuatu yang mereka senangi maupun tidak.

Dengan melihat bagaimana pentingnya akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah pada kelangsungan hidup organisasi dan berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengangkat judul : “PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA”.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang merupakan rumusan masalah adalah:

1. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Seberapa besar pengaruh produktivitas kerja pegawai akan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Kabupaten

Gorontalo Utara?

3. Seberapa besar pengaruh pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan akan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara?

3.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Produktivitas kerja pegawai dan Pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.

3.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari :

1. Bagi Praktis

Sebagai bahan untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah sehingga bisa menjadi juga sebagai bahan masukan dari peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang masalah yang sama agar lebih bisa dikembangkan.

2. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu dibidang akuntansi yang khususnya pengetahuan tentang pengaruh akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah, serta dapat bisa dijadikan bahan referensi untuk peneliti yang berminat mengkaji lebih lanjut mengenai hal tersebut.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk bisa mengetahui sehingga bisa

menambah wawasan pengetahuan masalah yang sebenarnya yang ada di dalam praktek tentang akuntabilitas daerah.dan pengelolaan keuangan

BAB II

PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas secara umum adalah istilah dimana yang menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang maupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang berkaitan. Akuntabilitas secara harfiah didalam bahasa inggris biasa disebut dengan *accountability* yang dapat diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat dapat disebut sebagai *accountable*. Lalu apa bedanya dengan *responsibility* padahal dalam artinya juga sama yaitu “tanggung jawab”. Pengertian *accountability* dan *responsibility* seringkali diartikan secara bersamaan, padahal sudah sangat jelas bahwa maknanya jelas berbeda. Beberapa para ahli telah menjelaskan bahwa didalam kaitannya dengan birokrasi, *responsibility* merupakan suatu otoritas yang diberikan atasan untuk bisa melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* sendiri merupakan suatu kewajiban untuk bisa menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Mardiasmo (2009) “mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi

amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Mahmudi (2010) “kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal)”.

Mardiosmo (2006) “sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic”.

Penty Kusumastuti (2014) “akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerja dan kinerjanya”.

Djalil (2014) “akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislative parlemen, dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responbility*), yang dapat dipertanyakan (*answerbility*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah”.

Akuntabilitas merupakan suatu dorongan psikologi sosial yang selalu dimiliki oleh seseorang untuk bisa menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. Di dalam menyelesaikan suatu tanggungjawabnya sebagai ahli yang profesional maka disetiap tugasnya harus senantiasa bisa menggunakan sikap pertimbangan moral serta sikap yang profesional di dalam jenis kegiatan yang akan dilakukannya.

Trianingsih, 2004 “Para profesional lebih merasa senang mengasosiasikan diri mereka dengan organisasi profesi mereka dalam melaksanakan tugas- tugasnya dan mereka juga lebih ingin menaati norma, aturan dan kode etikprofesi dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi”.

2.1.2. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2013) “dimensi akuntabilitas terbagi dalam 5 bagian antara lain:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otoritas.

- b. Akuntabilitas Manajerial (*Managerial accountability*).

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *costumer*-nya.

c. Akuntabilitas Program (*Program accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

d. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atau kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan

tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

e. Akuntabilitas Finansial (*Financial accountability*)

Akuntabilitas dalam finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*money public*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial juga sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

Di dalam akuntabilitas juga terdapat beberapa aspek-aspek, diantaranya yaitu:

- a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan
- b. Akuntabilitas berorientasi hasil
- c. Akuntabilitas memerlukan pelaporan
- d. Akuntabilitas itu tidak artinya tanpa konsekuensi
- e. Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Adapun tingkatan akuntabilitas menurut Majalah Akuntansi, yaitu:

- a. Akuntabilitas Personal, yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan diri kita sendiri.
- b. Akuntabilitas Individu, yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan suatu pelaksanaan.

- c. Akuntabilitas Tim, yaitu akuntabilitas yang dapat dibedakan dalam bekerja kelompok maupun tim.
- d. Akuntabilitas Organisasi, yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan internal dan eksternal dalam organisasi.
- e. Akuntabilitas Stakeholders, yaitu akuntabilitas yang dipisahkan stakeholders dan organisasi tersebut.

2.1.3 Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini pengelolaan keuangan daerah harus difokuskan kepada pengelolaan APBD sebagai wujud perencanaan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu entitasnya penyusunan/pengguna APBD untuk pelayanan publik. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah berarti kita sedang membahas kedudukan serta kewenangan dari orang- orang yang menangani keuangan daerah tersebut.

Menurut pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: “ Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dari segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:“ Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah”.

2.1.4. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Soleh dan Rohmansjah (2010) “prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah” meliputi:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasilkebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

b. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan

serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*. Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan keuangan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

c. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

d. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintahan daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan

kepentingan masyarakat.

e. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dan dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat segera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi kedepan.

2.1.5. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Daerah

Di dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka para pelaku pengelolaan keuangan daerah harus taat pada 10 asas, yaitu:

1. Tertib

Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah tersebut harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang bisa di dukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat bisa dipertanggungjawabkan.

2. Taat pada Peraturan Perundang-undangan

Adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah tersebut harus bepedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Efektif

Merupakan suatu pencapaian hasil dari suatu program dengan target yang sudah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluarannya dengan hasil.

4. Efisien

Merupakan suatu pencapaian keluaran yang sudah maksimum dengan suatu masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk bisa mencapai keluaran tersebut.

5. Ekonomis

Merupakan suatu pemerolehan dari masukan dengan kualitas serta kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6. Transparan

Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk bisa mengetahui serta mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7. Bertanggung Jawab

Merupakan suatu perwujudan dari seseorang untuk bisa mepertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang sudah dipercayakan kepadanya dalam rangka untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan

Adalah suatu keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang telah obyektif.

9. Kepatuhan

Adalah tindakan atau suatu sikap yang telah dilakukan dengan sangat

wajar dan profesional.

10. Manfaat untuk Masyarakat

Bahwa keuangan daerah tersebut harus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

2.1.6. Pelaku Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan ada beberapa para pelaku yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah tersebut, yaitu:

1. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Bendahara Umum Daerah
4. Penggunaan Anggaran
5. Pengguna Barang
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah
7. Kuasa Pengguna Anggaran
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
10. Bendahara Penerimaan
11. Bendahara Pengeluaran

2.1.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rizky Rasmana Hanafiah, Syukriy Abdullah, Mulia Saputra. (2016)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Di SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan intern di SKPK Pemerintah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara baik secara bersama-sama maupun individu.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara baik secara bersama-sama maupun individu.
2	Muhammad Alqodri. (2015)	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan, Dan Penyajian	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas keuangan, pengendalian keuangan	Sebagai hasil penelitian menemukan bahwa variabel akuntabilitas

		Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.	dan penyajian laporan keuangan tentang keuangan lokal manajemen di unit kerja regional di kota Dumai.	keuangan dan penyajian laporan keuangan mempengaruhi manajemen keuangan. Sementara pengujian dan secara bersamaan menemukan bahawa variabel akuntabilitas keuangan, control keuangan, dan penyajian laporan keuangan mempengaruhi bidang manajemen keuangan.
3	Andry Tonnaya, Sri Langgeng Ratnasari.	Pengaruh Akuntabilitas dan <i>Value For Money</i> Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan <i>value for money</i> baik secara parsial ataupun simultan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan standar	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan <i>value for money</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dimana

	Provinsi Kepulauan Riau Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel <i>Moderating.</i>	akuntansi pemerintahan sebagai variabel <i>moderating</i> apakah itu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung.	akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dan <i>value for money</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil uji residual menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan <i>value for money</i> terhadap pengelolaan keuangan daerah.
--	---	--	--

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu program yang menjelaskan secara garis besar logika berjalannya sebuah penelitian. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, dimana akuntabilitas (tanggungjawab) merupakan

hasil evaluasi terhadap suatu pekerjaan yang telah ditetapkan bersama. Penilaian akuntabilitas (tanggungjawab) terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah penetuan secara periodik efektivitas operasional di dalam suatu organisasi, bagian organisasi, berdasarkan sasaran strategi serta kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara bersama-sama.

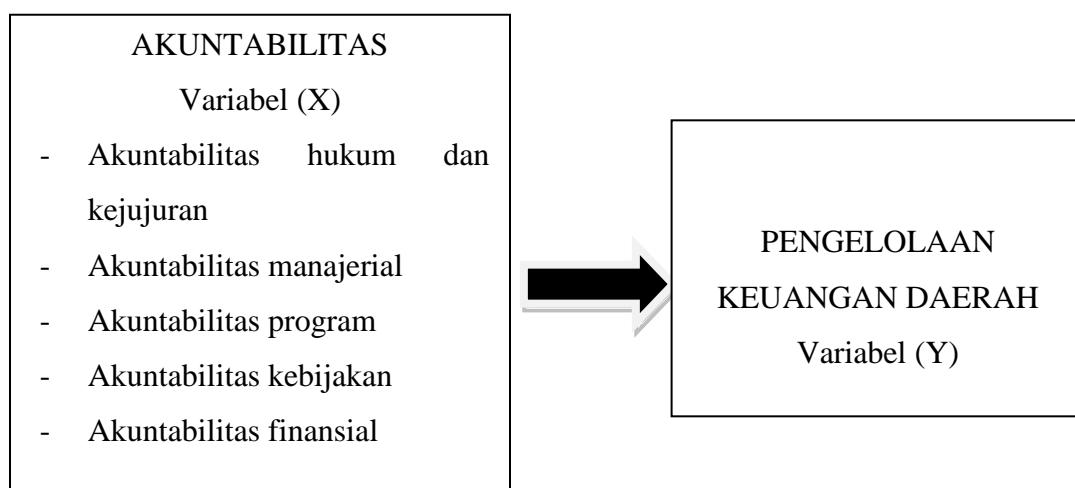
Akuntabilitas (tanggungjawab) dapat dilihat dari kinerja para karyawan yang ada disebuah perusahaan maupun badan tersebut. Karena dengan adanya akuntabilitas (tanggungjawab) kita bisa mengetahui apakah pekerjaan dari hasil pengelolaan keuangan daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau standar yang sudah ditetapkan atau tidak.

Sebuah badan atau organisasi yang baik termasuk didalamnya Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara adalah badan yang sangat memperhatikan akuntabilitas (tanggungjawab) dari para individunya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas (tanggungjawab) merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan di dalam suatu organisasi, karena dalam melakukan sebuah pekerjaan yang perlu kita amati adalah bagaimana tanggung jawab dari sebuah pekerjaan yang akan mereka selesaikan itu.

Akuntabilitas (tanggungjawab) ini juga merupakan dasar utama dari individu atau kelompok untuk melakukan sebuah pekerjaan di dalam badan atau organisasi tersebut, sehingga wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada

atasan apabila dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan siap menerima konsekuensi dari kesalahan yang telah diperbuat.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Riduwan (2014) “mengatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah”.

1. Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Produktivitas kerja pegawai akan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.

3. Pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan akan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

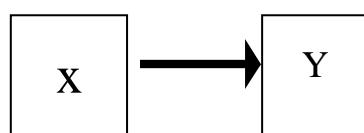
Objek penelitian ini menyangkut pengaruh akuntabilitas (X) terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan waktu penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Pada dasarnya desain penelitian menggambarkan prosedur-prosedur yang memungkinkan peneliti dapat menguji hipotesis penelitian tersebut untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik mengenai akuntabilitas antara variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian tersebut.

Dalam memilih metode penelitian, peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui pengaruh pengembangan kompetensi kepribadian guru terhadap hasil belajar siswa untuk itu peneliti menggunakan desain penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

Keterangan :

X = Akuntabilitas

Y = Pengelolaan keuangan daerah

3.2.2. Variabel

1. Variabel X

Sugiono (2012:61) mengemukakan variabel bebas (variabel independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen atau variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah pengembangan Akuntabilitas.

2. Variabel Y

Sugiono (2012:61) variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Oleh karena itu, variabel terikat(Y) dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan suatu kegiatan atau kesibukan yang dilakukan Pegawai pada saat proses pelaporan dan pembukuan.

3.2.3 Operasional Variabel

Untuk memudahkan pengukuran variabel penelitian, perlu mengoperasional penelitian yang akan diteliti. Operasional variabel dalam penelitian adalah:

Tabel 3.1
Operasional variabel X dan Y

Variabel	Sub variabel	Indikator dimensi	Skala
Akuntabilitas (Variabel X) Menurut Mahmudi (2013)	a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran	Lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.	Interval
	b. Akuntabilitas manajerial	Pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.	Interval
	c. Akuntabilitas program	Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.	
	d. Akuntabilitas kebijakan	Pertanggungjawaban lembaga publik atau kebijakan yang diambil.	Interval

	e. Akuntabilitas finansial	Lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.	Interval
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Variabel Y)	a. Akuntabilitas	Mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya.	Interval
Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010)	b. <i>Value for money</i>	Memiliki sistem akuntansi yang baik.	Interval
	c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (<i>public money</i>)	Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.	Interval
	d. Tranparansi	Keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan	Interval

		keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.	
e. Pengendalian		Pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dan dicapai.	Interval

Untuk mengukur setiap variabel yang dikemukakan pada tabel diatas, maka akan dibuatkan kuesioner dengan menggunakan Skala Likert. Dalam kuesioner akan disiapkan 5 (lima) pilihan jawaban, dan setiap pilihan jawaban akan diberikan bobot nilai yang berbeda seperti yang tampak pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Bobot nilai variabel

PILIHAN	BOBOT
Sangat setuju	5
Setuju	4
Kurang setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

3.3. Populasi dan sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan pengertian populasi tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 39 orang.

3.3.2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2014) “adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Karena jumlah populasi Pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara terlalu besar yaitu 39 orang, maka penulis menggunakan teknik sensus dalam penentuan sampel, di mana setengah dari populasi dijadikan sampel yakni sebanyak 20 orang dengan dapat mewakili jumlah populasi yang ada.

Tabel 3.3
Tabel Responden

Responden	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1

3	Perbendaharaan	1
4	Kabid Akuntansi	1
5	Kasubad pengembangan sistem akuntansi	1
6	Kasubag perencanaan dan keuangan	1
7	Staf Bid. Akuntansi	1
8	Staf Bid. Akuntansi	1
9	Staf Sekretaris	1
10	Bendahara Penerimaan	1
11	Staf Anggaran	1
12	Kasubag Anggaran	1
13	Staf pendapatan	1
14	Staf bidang Pendapatan	1
15	Staf Bidang Anggaran	1

16	Kasubag Hibah dan Bantuan Keuangan	1
17	Kasubid penyimpanan dan pemeliharaan aset	1
18	Kasie Pencatatan Pelaporan dan Evaluasi	1
19	Kasubid Penagihan	1
20	Staf Anggaran	1
Jumlah		20

3.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket (kuesioner)

Angket (Kuesioner) yaitu metode pengumpulan data dengan memberikan daftar pernyataan kepada setiap responden yang kemudian dijawab. Menurut Riduwan (2014) “angket adalah daftar pernyataan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna”.

2. Observasi

Observasi yaitu melihat secara langsung dan mencari informasi yang ada kaitannya dengan penelitian. Menurut Riduwan (2014) “observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan”.

3.5. Teknik Analisis Data

Data – data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, Selanjutnya diolah dan dianalisis secara statistik melalui uji regresi korelasi namun sebelumnya didahului dengan uji normalitas data untuk kedua variabel yang diteliti, untuk dapat mengetahui tes yang akan digunakan dalam melalui analisis data tersebut apakah berdistribusi normal atau tidak. Untuk kepentingan analisis tersebut, penelitian melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

3.5.1. Regresi

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Secara umum persamaan regresi linear sederhana adalah :

$$\hat{Y} = a + b X$$

Sugiyono (2010:188)

Keterangan:

\hat{Y} : Pengelolaan Keuangan Daerah

a : konstanta

b : koefisien regresi

$Y = a + b X$

X : Akuntabilitas

3.5.2. Analisis Koefesien Korelasi dan Determinasi

Pengujin korelasi dimaksudkan untuk mengetahui beberapa kekuatan atau derajat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan terutama untuk dapat kuantitatif dinamakan koefisien korelasi (r). Sedangkan koefisien penentu derajat hubungan antara variabel dinamakan koefisien determinasi (r^2). Rumus umum yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan uji korelasi dengan formulasi sebagai berikut.

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum n^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2009:181)

Keterangan:

X : Skor item ke-i

Y : Skor total variabel

3.5.3 Uji Validasi

Validasi Atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Akdon (2008:143) menegaskan “validitas diartikan lebih luas yaitu mengukur apa yang

hendak diukur (ketepatan).

Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik product moment angka kasar yang dikemukakan oleh person.

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\}\{N\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2015:255)

Keterangan

r_{xy} : koefisien korelasi antara skor item dan skor total tiap item

Σx : jumlah skor tiap-tiap item

Σy : jumlah skor total item

N : jumlah responden uji coba angket

Σx^2 : jumlah kuadrat skor tiap-tiap item

Σy^2 : jumlah kuadrat skor total tiap responden

Σxy : jumlah perkalian skor tiap item dan skor total tiap-tiap responden

N : jumlah responden

Suatu sistem dikatakan valid apabila mempunyai indeks diskriminasi yang tinggi, yaitu apabila nilai r hitungan atau lebih besar dari r tabel maka data dinyatakan valid ($r_{xy} > r_{tab}$). Sebaliknya jika r hitungan lebih kecil atau sama dari r tabel maka item tidak dapat dipakai/tidak valid ($r_{xy} < r_{tab}$). Item yang tidak valid dibuang sehingga yang digunakan untuk penelitian hanya item yang valid, kecuali salah

satu indikator tidak ada item yang mewakili karena tidak valid.

3.5.4 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2016: 178). Pada penelitian ini pengujian uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode alpha yaitu dengan menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran. Untuk mencari reliabilitas digunakan rumus alpha:

$$r_{11} = \left[\frac{K}{K-1} \right] \left[\frac{\Sigma Q_i^2}{Q_i^2} \right] \quad (\text{Arikunto, 2013: 23})$$

Keterangan:

r_{11} = reliabilitas instrumen

K = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

ΣQ_i^2 = jumlah varians butir

Q_i^2 = varians total

3.5.5 Uji Normalitas

Untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka digunakan rumus :

$$KD = 1,36 \frac{\sqrt{n_1 + n_2}}{n_1 \cdot n_2} \quad (\text{Sugiyono, 2013 :257})$$

Dimana :

KD = Jumlah *Kolmogorov-Smirnov* yang dicari

n1 = Jumlah sampel yang diperoleh

n2 = Jumlah sampel yang diharapkan\

3.6 Hipotesis Statistika

Hipotesis statistik adalah pertanyaan atau mengetahui keadaan populasi dan sifatnya masih sementara atau lemah keadaanya. Untuk kepentingannya pengujian secara statistik, maka hipotesis penelitian di transfer ke dalam hipotesis statistik sebagai berikut :

$$H_0 : \beta \leq 0 \text{ dan } H_1 : \beta \leq 0$$

Keterangan :

$H_0 : \beta \leq 0$: tidak terdapat pengaruh antara variabel X (Akuntabilitas) dengan variabel Y (Pengelolaan Keuangan Daerah)

$H_1 : \beta \geq 0$: terdapat pengaruh antara variabel X (Akuntabilitas) dengan variabel Y (Pengelolaan Keuangan Daerah).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Lokasi Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti di kantor Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan dalam memperoleh data yaitu dengan penyebaran angket, dan observasi dengan tahapan yang dilakukan tersebut peneliti melaksanakannya pada pegawai di kantor Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.

4.2. Visi dan Misi

Perencanaan strategik mengandung visi, misi, tujuan sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan yang realistik dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam rangka menunjang dan membantu Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menuju kesuksesan pelaksanaan fungsi tersebut, Badan Keuangan menyusun visinya yang menunjukkan jati diri dan fungsinya sebagai unit di bawah Bupati Gorontalo Utara.

4.2.1. Visi

Visi Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara adalah “Terwujudnya

pengelolaan keuangan daerah yang maju, bersih, transparan dan akuntabel demi terciptanya kredibilitas, keterbukaan dan keandalan”.

4.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan misi badan keuangan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan dan pendapatan asli daerah
- b. Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu
- c. Mewujudkan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundungan
- d. Mewujudkan penatausahaan aset sesuai peraturan perundungan
- e. Mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel

4.2.3. Uraian Tugas Dan Fungsi

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi pegawai Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara diuraikan berikut ini

1. Kepala Badan

- Tugas

Membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dibidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah.

- Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan dan aset daerah

2. Pelaksanaan tugas teknis dibidang keuangan dan aset daerah
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis dibidang keuangan dan aset daerah.
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan dan aset daerah.
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris
- Tugas
- Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan badan keuangan dan aset daerah.
- Fungsi
1. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas badan keuangan dan aset daerah
 2. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran badan keuangan dan aset daerah.
 3. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang dan aset daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Sub bagian hibah dan bantuan keuangan

- Tugas

Menyusun laporan pertanggung jawaban dan pelaksanaan tugas

- Fungsi

1. Menyiapkan bahan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan perbendaharaan belanja hibah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan.
2. Melaksanakan pengujian SPM belanja tidak langsung hibah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan.

4. Sub bagian perencanaan dan keuangan

- Tugas

Membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan badan keuangan.

- Fungsi

1. Penata usahaan badan keuangan
2. Penyusunan pelaporan badan keuangan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

5. Sub bagian umum dan kepegawaian

- Tugas

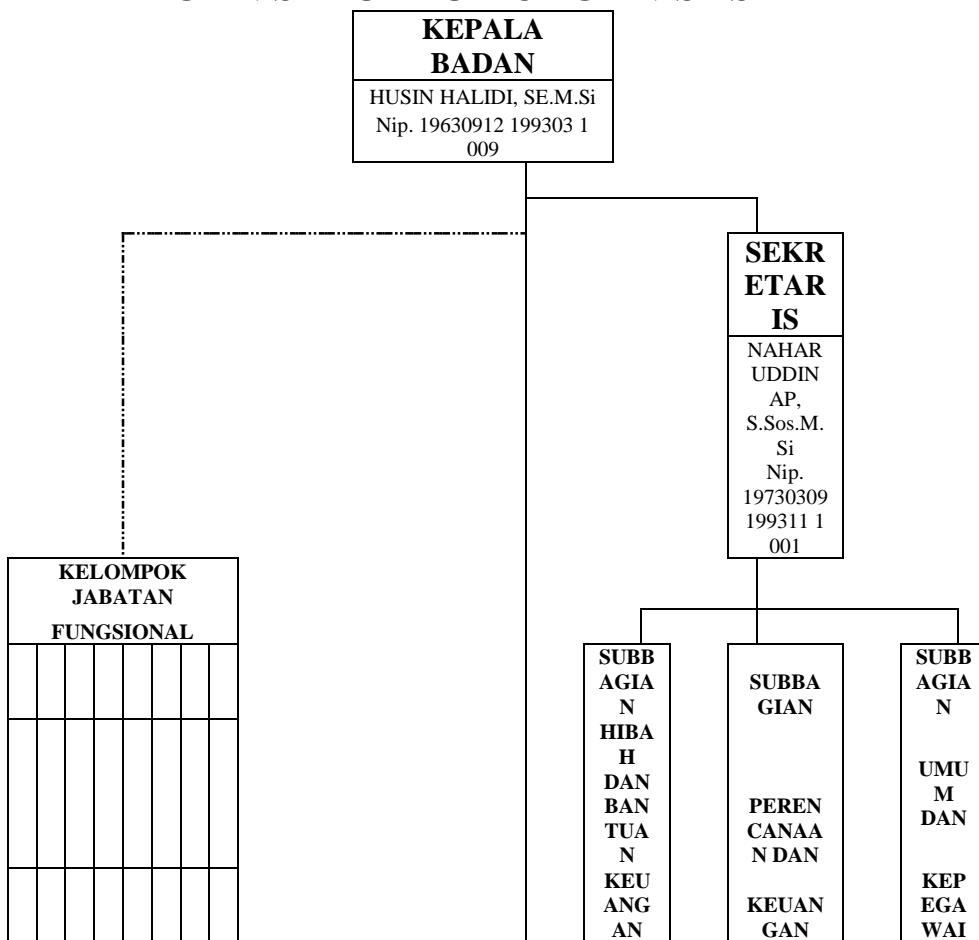
Membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah

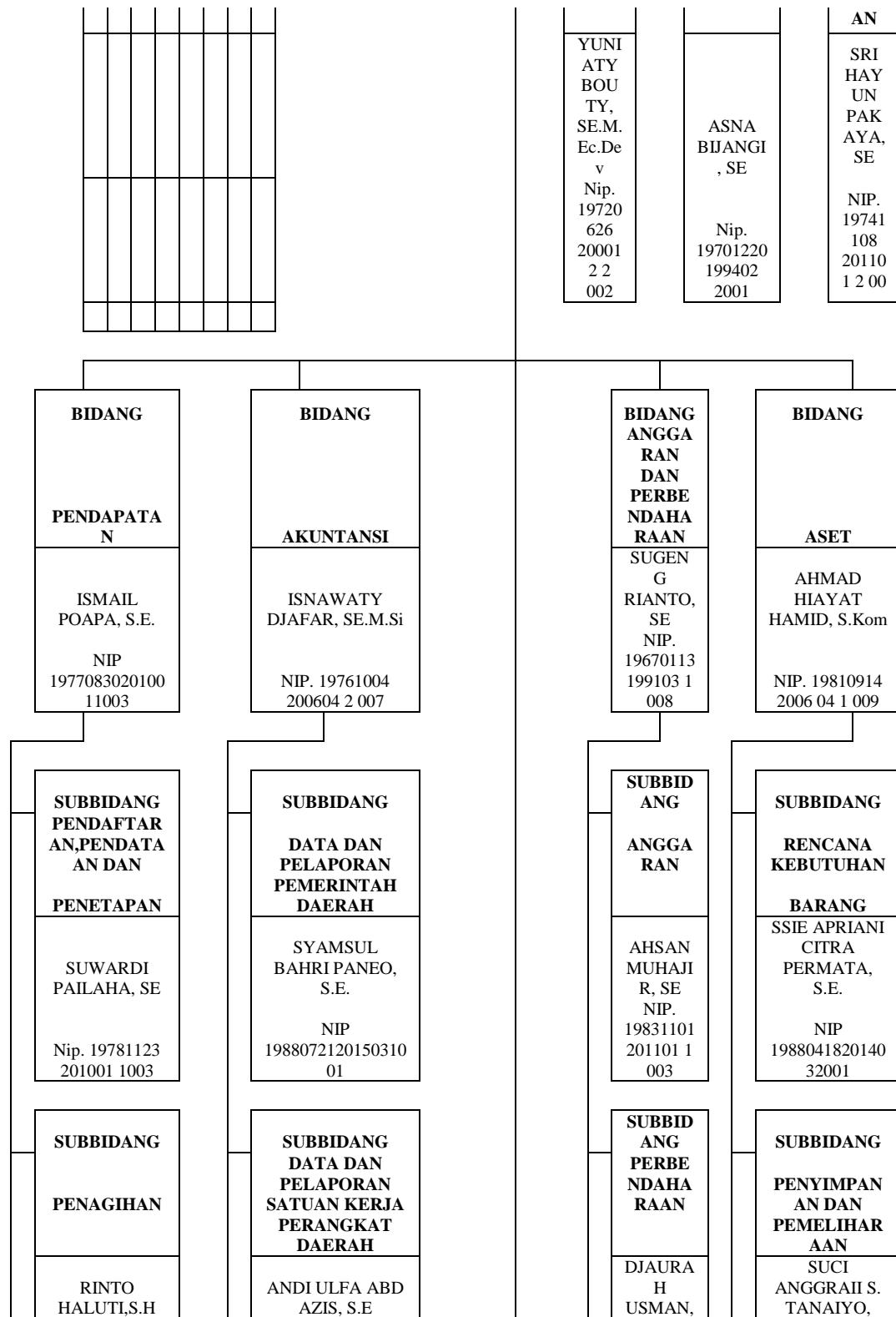
tangga, tata usaha, dan kepegawaian badan.

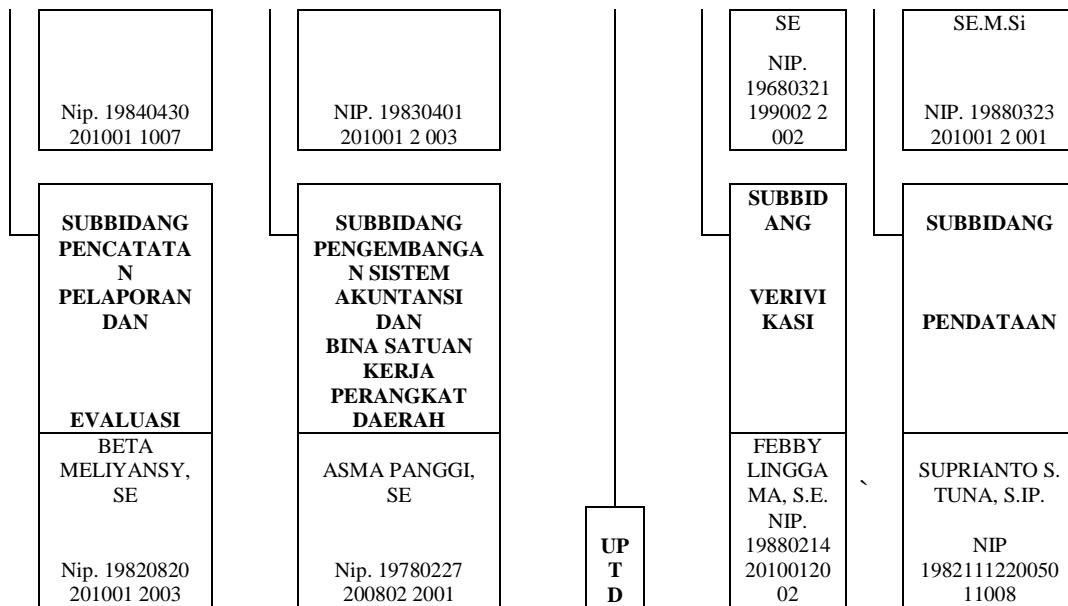
- Fungsi
 1. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha badan
 2. Pengelolaan barang dan jasa badan
 3. Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum

4.3 Strukutur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI







4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Deskripsi Responden

No	Tingkat pendidikan	Jumlah Responden	Presesntase (%)
1	SMA	1	20%
2	S1	14	60%
3	S2	3	20%
TOTAL		20	100%

4.4.2 Uji Validitas

Uji validitas dilaksanakan dengan rumus korelasi bivariate person

dengan alat bantu program SPSS versi 23,0. Item angket dalam uji validitas dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada nilai signifikansi 5%.

Adapun ringkasan hasil uji validitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Uji validitas Akuntabilitas (X)

item	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
r-Hitung	0,911	0,753	0,775	0,745	0,787	0,901	0,893	0,555
r-tabel								
5% (20)	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361
Ket	Valid							

Sumber : Data Primer yang di olah, 2020

Tabel 4.2
Uji validitas Pengelolaan keuangan daerah
(Y)

Item	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
r-Hitung	0,921	0,921	0,520	0,576	0,807	0,889	0,770
r-tabel							
5% (20)	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361	0,361
Ket	Valid						

Sumber : Data Primer yang di olah, 2020

Hasil perhitungan uji validitas sebagaimana tabel-tabel diatas, menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada nilai signifikansi 5%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua item dalam angket penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk mengukur masing masing variabel sebagai instrument penelitian.

4.4.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha

Cronbach dengan alat bantu program SPSS versi 23,0. Penggunaan teknik Alpha Cronbach akan menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel), apabila nilai Cronbach Alpha $> 0,6$ (Suharsimi Arikunto, 2002 : 172)

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	r Kritis	Keterangan
Akuntabilitas	0,908	0,6	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,881	0,6	Reliabel

Sumber : Data Primer yang di olah, 2020

Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai cronbach's alpha variabel Akuntabilitas (X) sebesar 0,908, dan variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 0,881 menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai Cronbach Alpha $> 0,6$. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa angket pada penelitian ini reliabel atau konsisten sehingga dapat digunakan.

4.5 Hasil Analisis Data

4.5.1. Pengujian Normalitas Data

Pengujian normalitas data pada penelitian dilakukan dengan menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov (KS). Hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal	Mean	0.0000000
Parameters	Std. a,b Deviation	1.72388978
Most	Absolute	0.135
Extreme	Positive	0.132
Difference	Negative	-0.135
s		
Test		0.135
Statistic		
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

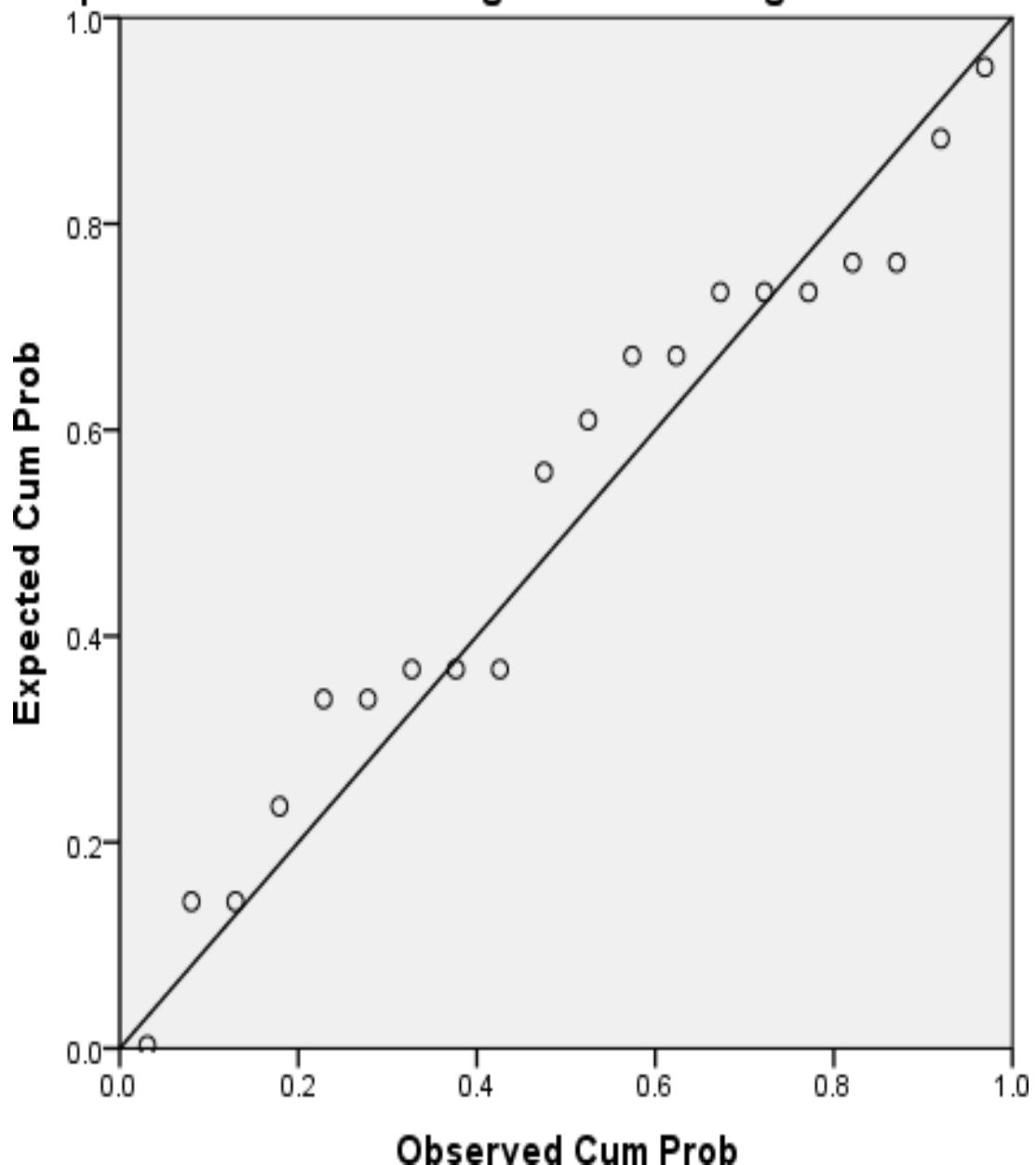
- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengujian normalitas data sebesar 0,200 Berdasarkan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa $0,200 > 0,05$ maka nilai signifikansi yang diperoleh ini masih lebih besar sehingga data berdistribusi normal.

Kesimpulan dari pengujian ini juga didukung dengan hasil plot data yang menunjukkan bahwa data dari variabel Pengelolaan keuangan daerah menyebar di sekitar garis lurus seperti yang tampak dalam grafik berikut ini:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah



Gambar 4.1 :
Hasil Pengujian Normalitas

4.5.2. Hasil Analisis Regresi

Setelah persyaratan normalitas data dipenuhi maka selanjutnya dilakukan analisis regresi antara Akuntabilitas terhadap Pengelolaan keuangan daerah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Akuntabilitas secara parsial Pengelolaan keuangan daerah

Hasil analisis regresi dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Koefisien Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	8,185	4.023		2.035	0.057
(Constant)	0,614	0.111	0.792	5.511	0.000
Akuntabilitas					

a. Dependent Variable: Hasil akuntabilitas

Tabel diatas menunjukkan hasil persamaan regresi sederhana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

$$\hat{Y}=8,185+0,614x$$

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diinterpretasikan beberapa hal berikut :

- Nilai konstanta sebesar 8,185 merupakan nilai konstan/konsisten variabel Akuntabilitas, yang mengandung arti bahwa apabila pengaruh dari

variabel Akuntabilitas di abaikan, maka nilai pada variabel Pengelolaan keuangan daerah sebesar 8,185.

- b. Koefisien regresi untuk variable Akuntabilitas bernilai positif sebesar 0,614.

Koefisien regresi yang positif ini menunjukkan arah pengaruh variable x terhadap variable y adalah positif, atau Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik Akuntabilitas maka akan semakin meningkat juga Pengelolaan keuangan daerah. Setiap penambahan 1 satuan nilai Akuntabilitas maka nilai Pengelolaan keuangan daerah akan bertambah sebesar 0,614.

4.5.3 Pengujian Model Regresi

Pengujian model regresi ini dilakukan dengan menggunakan uji F dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penentuan Hipotesis

H_0 : seluruh koefisien regresi tidak signifikan (model regresi tidak signifikan) H_1 : minimal satu koefisien regresi signifikan (model regresi signifikan).

2. Penetuan tingkat signifikansi

Tingkat kepercayaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% atau dengan kata lain tingkat signifikansinya (alpha) sebesar 5%.

3. Penentuan statistik uji

Dalam melakukan uji kabaikan model digunakan uji F sebagai berikut :

- Penentuan kriteria uji

Penentuan kriteria uji didasarkan pada perbandingan antara nilai F hitung yang diperoleh dengan F tabel. Jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel maka H₀ ditolak, dan jika nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel maka H₀ diterima. Pengujian juga dapat didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari nilai alpha maka H₀ diterima.

Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Pengujian Model Regresi

Model	ANOVA ^a		Mean		
	Sum of Squares	df		Square	F
1 Regression	95.286	1	95.286	30.376	.000
Residual	56.464	18	3.137		^b
Total	151.750	19			

a.Predictors: (Constant), Akuntabilitas

b.Independent Variable: Pengelolaan keuangan Daerah

Hasil analisis, nilai F-hitung untuk model regresi antara Akuntabilitas dengan Pengelolaan keuangan Daerah adalah sebesar 30,376, sedangkan nilai F- tabel yang diperoleh dari $df_1 = k-1$ dan $df_2 = n-k$ adalah sebesar 4,20. Jika dibandingkan maka $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Adapun nilai

signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai alpha yang digunakan yakni sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan, atau variabel X Akuntabilitas dapat memprediksi Y Pengelolaan keuangan Daerah.

4.5.4 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara sendiri “parsial” variabel independen (Akuntabilitas) terhadap variabel dependen (Pengelolaan keuangan daerah). Penentuan kriteria uji didasarkan pada perbandingan antara nilai t hitung yang diperoleh dengan t-tabel. Jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Pengujian juga dapat didasarkan pada perbandingan nilai alpha yang digunakan yakni 0,05. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berikut ini perhitungan koefisien statistik uji dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.185	4.023		2.035	0.057
Akuntabilitas	0.614	0.111	0.909	5.511	0.000

Hasil pengujian t untuk variabel X “Akuntabilitas” diperoleh nilai t hitung

= 5,511. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan t-tabel menggunakan batas signifikan 0,05 dan nilai df n-k diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,048, , sehingga t- hitung > t-tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. Adapun pengujian pada perbandingan nilai signifikan didapatkan nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai alpha yakni 0,05. Dengan demikian hipotesis uji t variabel Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan hipotesis penelitian dapat dibuktikan atau diterima. Dengan demikian pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa indikator Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan pada Pengelolaan keuangan daerah.

4.5.5 Pengujian Koefisien Korelasi Dan Determinasi

Untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah digunakan koefisien korelasi (r). Besarnya koefisien korelasi adalah berkisar antara 0 sampai dengan 1. Koefisien determinasi (2) digunakan untuk mengetahui tingkat paling baik antara dua variabel atau digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi dari variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y yang biasanya dinyatakan dalam persentase dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya (Ghozali,2001)

Tabel 4.8
Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.792 ^a	0.628	0.607	1.171

Predictors: (Constant), Akuntabilitas

Berdasarkan hasil estimasi model persamaan regresi yang telah dilakukan diatas diperoleh nilai koefisien hubungan/korelasi (r) sebesar 0,792 atau mendekati 1 artinya terdapat hubungan yang kuat. sedangkan koefisien determinasi (r²) menunjukkan besarnya kontribusi sebesar 0,628 atau 62,8% kontribusi Akuntabilitas terhadap Pengelolaan keuangan daerah, sementara sisanya 0,372 atau 37,2% dipengaruhi oleh variabel lain seperti pengwasan, dan transparansi anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah.

4.6 Pembahasan

Aspek penting yang harus dipertimbangkan di dalam setiap pengelolaan keuangan daerah adalah suatu legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan keuangan secara baik, perlindungan terhadap aset fisik dan finansial, serta mencegah terjadinya pemborosan aset dan salah urus. Berdasarkan pandangan tersebut, baik dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan di dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat, dengan misi penting

adalah peningkatan efisiensi serta efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat tersebut. Sehingga Akuntabilitas adalah jawaban dari peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan di satu daerah. Sebuah badan atau organisasi yang baik termasuk didalamnya Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara adalah badan yang sangat memperhatikan akuntabilitas (tanggungjawab) dari para individunya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas (tanggungjawab) merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan di dalam suatu organisasi, karena dalam melakukan sebuah pekerjaan yang perlu kita amati adalah bagaimana tanggung jawab dari sebuah pekerjaan yang akan mereka selesaikan itu. Akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun. Akuntabilitas dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah, Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara berkesinambungan, Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya, Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan,

serta dapat diper- tanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam hasil penelitian ini antara uji korelasi product moment dan uji hipotesis yakni dengan uji t dapat disimpulkan bahwa kedua uji penelitian tersebut memiliki kesepadan hasil uji dikarenakan baik r-hitung dengan t-hitung lebih besar daripada r-tabel dan t-tabel yang ada, dan hasil persamaan regresi adalah $\hat{Y} = 8,185 + 0,614x$ besar pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 62,8% dan sisanya 37,2% dipengaruhi oleh variabel lain seperti pengawasan, dan transparansi anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah.. Hasil pengujian hipotesis statistika memberikan nilai t-hitung untuk variabel akuntabilitas 5,511 lebih besar dari nilai t-tabel 2,048 dengan ketentuan t- hitung > t-tabel maka H0 ditolak H1 diterima. Hal ini menandakan bahwa penelitian ini antara variabel akuntabilitas dengan variabel pengelolaan keuangan daerah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini searah dengan teori-teori yang ada salah satunya adalah teori Akuntabilitas dalam mengelola keuangan, menurut Halim, 2004: 167 “Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pelaporan kinerja yang diterbitkan secara regular akan menjadi langkah maju dalam mendemonstrasikan proses akuntabilitas”.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah pada badan keuangan daerah kebupaten gorontalo utara.. Koefisien regresi yang positif menunjukkan semakin baik Akuntabilitas maka akan mampu meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Adapun nilai t-hitung jika dibandingkan dengan t table pada taraf signifikansi 5% sebesar 5,511 maka $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ 2, 048 ($5,511 > 2,048$). sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak. Besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah pada badan keuangan daerah kebupaten gorontalo utara ditunjukkan oleh nilai koefisien diterminasi sebesar 0,628 atau 62,8%.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah pada badan keuangan daerah kebupaten gorontalo utara. Dari rumusan masalah penelitian yang diajukan, analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu variabel X Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada variabel Y pengelolaan keuangan daerah, dengan nilai regresi yaitu $\hat{Y} = 8,185 + 0,614x$ dan besaran kontribusi sebesar 0,628 atau 62,8% kontribusi akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sementara sisanya 0,372 atau 37,2% berupa kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dan di desain dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian variabel ini sebaiknya diperhatikan oleh pimpinan dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja pegawai dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas

dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap variabel lain diantaranya seperti pengwasan, dan transparansi anggaran yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan daerah selain akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, (2010). *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta. Rineka Cipta
- Akdon. (2008). *Aplikasi statistika dan metode penelitian untuk administrasi dan manajemen*. Bandung: Dewa Ruchi. Cetakan ke 2
- Djalil, Rizal, (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka
- Mardiosmo, (2006). *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiosmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Mahmudi, (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi, (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Nasution, (2012). *Metode Research*. Jakarta. Bumi Aksara
- Riduwan, (2014). *Metode & Teknik Penyusunan Proposal penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Sugiyono. (2012). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung. Alfabet

Soleh dan Rohmansjah, (2010), *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokus media Republik Indonesia. 2005.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

LAMPIRAN 1 : ANGKET PENELITIAN

DAFTAR PERNYATAAN

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :

2. NIP :

3. Jabatan :

B. PERNYATAAN

Beri jawaban atas pernyataan berikut ini sesuai dengan pendapat anda, dengan

cara member tanda (x) pada kolom yang tersedia

Keterangan : STS : sangat tidak setuju

TS : Tidak setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat setuju

C. Pernyataan untuk akuntabilitas (X)

1. Seseorang harus memiliki perilaku jujur dalam melakukan pekerjaan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju

- c. Netral
 - d. Setuju
 - e. Sangat setuju
2. Seseorang harus menaati ketentuan hukum yang berlaku
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Netral
 - d. Setuju
 - e. Sangat setuju
 3. Seseorang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Netral
 - d. Setuju
 - e. Sangat setuju
 4. Seseorang mampu merencanakan/membuat program yang akan dilaksanakan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Netral
 - d. Setuju
 - e. Sangat setuju
 5. Seseorang memiliki tanggung jawab menyelesaikan program yang sudah dibuat
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Netral
 - d. Setuju
 - e. Sangat setuju
 6. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab pada kebijakan yang diambil
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Netral
 - d. Setuju
 - e. Sangat setuju

7. Setiap instansi mampu mengelola dana secara ekonomis, efisien, dan efektif
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Netral
 - d. Setuju
 - e. Sangat setuju
8. Setiap instansi tidak melakukan pemborosan dana atau korupsi
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Netral
 - d. Setuju
 - e. Sangat setuju

D. Pernyataan untuk pengelolaan keuangan daerah (Y)

9. Setiap pegawai harus mengambil keputusan berperilaku sesuai dengan amanah yang diterimanya
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Netral
 - d. Setuju
 - e. Sangat setuju
10. Pegawai harus memiliki sistem akuntansi yang baik
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Netral
 - d. Setuju
 - e. Sangat setuju
11. Pemimpin harus menunjuk staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Netral
 - d. Setuju
 - e. Sangat setuju

12. Pemimpin dapat meminimalkan kesempatan untuk korupsi pada pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Netral
 - d. Setuju
 - e. Sangat setuju
13. Pemimpin serta pegawai perlu adanya keterbukaan dalam membuat kebijakan mengenai keuangan daerah
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Netral
 - d. Setuju
 - e. Sangat setuju
14. Transparansi keuangan daerah perlu dilakukan sehingga dapat diketahui oleh DPRD dan masyarakat
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Netral
 - d. Setuju
 - e. Sangat setuju
15. APBD perlu dilakukan evaluasi untuk membandingkan antara yang dianggarkan dan dicapai
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Netral
 - d. Setuju
 - e. Sangat setuju

LAMPIRAN 2 DATA PENELITIAN

Responden	variabel X AKUNTABILITAS								Xtotal
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
R1	5	5	4	4	5	5	4	4	36
R2	5	4	4	4	5	5	5	5	37
R3	5	4	5	5	4	5	5	5	38
R4	4	4	3	4	4	4	3	4	30
R5	5	5	4	4	5	5	4	5	37
R6	5	4	5	5	4	5	4	5	37
R7	5	4	4	5	5	5	4	5	37
R8	4	4	4	4	4	5	4	5	34
R9	5	5	5	5	5	5	5	5	40
R10	5	5	5	5	5	5	5	5	40
R11	4	4	4	4	4	4	3	4	31
R12	4	3	4	4	3	4	3	5	30
R13	5	5	5	5	5	5	5	5	40
R14	4	3	4	4	3	4	3	5	30
R15	5	5	5	5	5	5	5	5	40
R16	4	4	3	4	4	4	4	4	31
R17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
R18	5	5	4	4	5	5	4	5	37
R19	5	4	5	5	4	5	4	5	37
R20	5	4	4	5	5	5	4	5	37

RESPONDEN	variabel Y PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Ytotal
R1	4	4	4	4	5	4	4	29
R2	5	5	4	4	5	5	4	32
R3	5	5	4	4	5	5	4	32
R4	4	4	3	4	4	4	3	26
R5	5	5	4	4	5	5	4	32
R6	4	4	3	4	5	5	4	29
R7	4	4	4	4	5	4	4	29
R8	5	5	4	4	5	5	4	32
R9	5	5	4	5	5	5	5	34
R10	5	5	3	5	5	5	4	32
R11	4	4	3	4	4	4	5	28
R12	4	4	3	4	4	4	3	26
R13	5	5	3	5	5	5	5	33
R14	4	4	3	4	4	4	3	26
R15	5	5	4	5	5	5	5	34
R16	4	4	4	4	5	4	3	28
R17	5	5	3	5	5	5	4	32
R18	4	4	3	4	4	4	3	26
R19	5	5	4	4	5	5	4	32
R20	5	5	4	4	5	5	5	33

LAMPIRAN 3 : HASIL PENGUJIAN INSTRUMEN PENELITIAN

Validitas dan Reliabilitas

VARIABEL X (AKUNTABILITAS)

X			
data	t-hitung	r tabel	kesimpulan
x1	.911	0.361	VALID
x2	.753	0.361	VALID
x3	.775	0.361	VALID
x4	.745	0.361	VALID
x5	.787	0.361	VALID
x6	.901	0.361	VALID
x7	.893	0.361	VALID
x8	.555	0.361	VALID

Apabila ini lebih besar dari R-tabel maka data dinyatakan valid

Apabila ini lebih kecil dari signifikansi alpha maka data dinyatakan valid

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.908	8

Data Cronbach adalah hasil dari tingkat kepercayaan dari 1 bilik atau bagian dalam angket/kuesioner

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Kepercayaan	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1	31.25	10.408	tinggi	0.884
x2	31.65	10.134	sangat tinggi	0.901
x3	31.65	10.029	tinggi	0.898
x4	31.45	10.787	tinggi	0.899
x5	31.50	9.842	tinggi	0.898
x6	31.20	10.589	tinggi	0.887
x7	31.80	9.011	tinggi	0.884
x8	31.15	11.818	sangat tinggi	0.913

Apabila ini lebih besar dari 0.59 maka data memiliki tingkat kepercayaan yang cukup untuk diuji.

VARIABEL Y

Y			
data	t-hitung	r tabel	kesimpulan
y1	.921	0.361	VALID
y2	.921	0.361	VALID
y3	.520	0.361	VALID
y4	.576	0.361	VALID
y5	.807	0.361	VALID
y6	.889	0.361	VALID
y7	.770	0.361	VALID

Apabila ini lebih besar dari R-tabel maka data dinyatakan valid

Apabila ini lebih kecil dari signifikansi alpha maka data dinyatakan valid

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.881	7

Data Cronbach adalah hasil dari tingkat kepercayaan dari 1 bilik atau bagian

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Kepercayaan	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y1	25.70	5.589	tinggi	0.836
y2	25.70	5.589	tinggi	0.836
y3	26.70	6.747	tinggi	0.899
y4	26.00	6.737	tinggi	0.887
y5	25.50	6.158	tinggi	0.857
y6	25.65	5.713	tinggi	0.842
y7	26.25	5.355	tinggi	0.880

dalam angket/kuesioner.

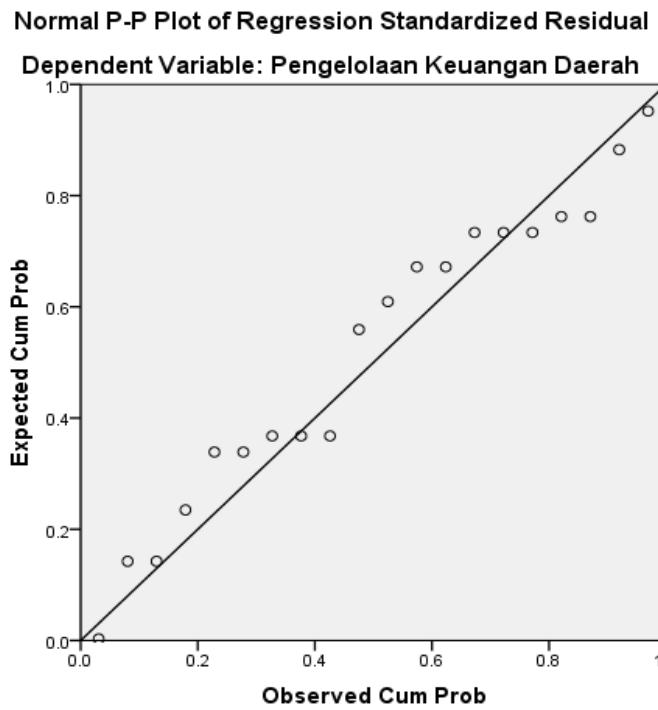
Apabila ini lebih besar dari 0.59 maka data memiliki tingkat kepercayaan yang cukup untuk diuji

LAMPIRAN 4 HASIL UJI NORMALITAS

Residuals Statistics^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	26.60	32.74	30.25	2.239	20
Residual	-4.894	2.947	0.000	1.724	20
Std. Predicted Value	-1.631	1.110	0.000	1.000	20
Std. Residual	-2.763	1.664	0.000	0.973	20

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

DIAGRAM DISTRIBUSI DATA



Grafik ini menunjukkan pola penyebaran dari hasil jawaban responden (dimana makin dekat ke garis tengah, maka makin berdistribusi normal lah data)

Hasil Uji Normalitas Data 1 Sample K-S

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean Std. Deviation	0.0000000 1.72388978
Most Extreme Differences	Absolute Positive Negative	0.135 0.132 -0.135
Test Statistic		0.135
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil signifikansi Kolmogorov apabila lebih besar dari 0.05 maka data dinyatakan berdistribusi normal.

LAMPIRAN 5 : Hasil Output SPSS

Variables Entered/Removed^b

Variables Entered	Variables Removed	Method
AKUNTABILITAS (X) ^a	.	Enter

HASIL UJI REGRESI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.792 ^a	0.628	0.607	1.771

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat pengaruh disini 0.62 atau 62%, dengan R 0.792 yang berarti memiliki keterikatan yang cukup kuat.

Variables Entered/Removed^b

Variables Entered	Variables Removed	Method
AKUNTABILITAS (X) ^a	.	Enter

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	95.286	1	95.286	30.376	.000 ^b
Residual	56.464	18	3.137		
Total	151.750	19			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas

Signifikansi data tingkat hub dilihat disini dan bandingkan dengan f tabel, untuk menentukan linearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.185	4.023		2.035	0.057
Akuntabilitas	0.614	0.111	0.792	5.511	0.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

Nilai konstan dan B dilihat disini untuk $Y=a+bx$

LAMPIRAN 6 R TABEL

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524

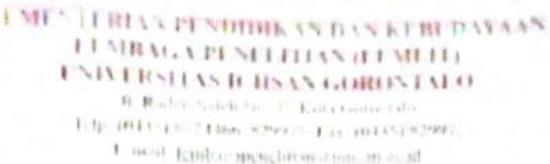
LAMPIRAN 7 F TABEL

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2) df untuk	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	181	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.98	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.08	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20

LAMPIRAN 8 T TABEL

cum. Prob	$t_{.50}$	$t_{.25}$	$t_{.10}$	$t_{.85}$	$t_{.90}$	$t_{.95}$	$t_{.975}$	$t_{.99}$	$t_{.995}$	$t_{.999}$	$t_{.9995}$
one-tail	0.50	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005
two-tails	1.00	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001
Df											
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.31	636.62
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
z	0.000	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291
	0%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	99%	99.8%	99.9%



Nomor 2258/PIP/LEMIKU-UNISAN/G10/II/2020

Lampiran :

Hal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala KESBANGPOL Kab. Gorontalo Utara

dt.

Kab. Gorontalo Utara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi** kepada :

Nama Mahasiswa : Refni J. Bouti

NIM : E1116117

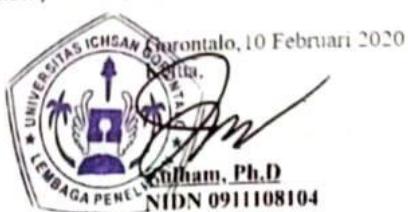
Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Judul Penelitian : PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN
KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Kusnodanupojo Blok Plan Desa Moringkapoto Kec. Kwandang Kode Pos 96252

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/KesBangPol-Rekom/ 35 /VII/2020

Berdasarkan Surat dari Ketua Lembaga Penelitian STMIK Ihsan Gorontalo Nomor 2258/PIP/LFMLIT-UNISAN/GTO/VII/2020 Tanggal 10 Feb 2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dan jan ini Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara Memberikan Rekomendasi kepada

>Nama	Refni J. Bouti
NIDN	11116117
Fakultas	Ekonomi
Prodi	Akuntansi
Judul Penelitian	<i>“Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara”</i>
Tempat Penelitian	Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara
Waktu Penelitian	3 Bulan

Dalam melakukan penelitian harus memtaati ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada Pemerintah setempat dan tempat yang menjadi obyek penelitian.
2. Tidak diperlukan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian.
3. Menjaga keamanan dan keteribahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Harus memtaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
5. Dalam meliputi kegiatan di lapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah setempat
6. Tidak diperlukan melakukan kegiatan yang berbauan politik.
7. Setelah selesai dilaksanakan penelitian hasil kajian diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Gorontalo Utara C.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara.
8. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat rekomendasi ini tidak memtaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kwandang, 20 Feb 2020



Tembusan Yth

1. Bupati Gorontalo Utara (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Keuangan
3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN KEUANGAN

Alamat Jl. Kusnodarapoyo No. 050 Telp. 01521310650 Fax. 310503 Kwandang Kode Pos 96252

SURAT KETERANGAN
Nomor : 900/BK-Gorut/201/VII/2020

Memperhatikan surat rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara No.nor : 070/Kesbang Pol/35/VII/2020 Tanggal 5 Mei 2020. Perihal rekomendasi penelitian jangan ini diberikan surat keterangan kepada

Nama	:	REFNI BOUTI
Nim	:	E 1116117
Program Studi	:	Akuntansi
Judul Penelitian	:	Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Dengan ini disampaikan bahwa yang bersangkutan benar - benar telah melaksanakan penelitian di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara..

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA BADAN
SEKRETARIS



NAHARUDDIN, AP.S.Sos.I, Si
NIP.19730903199311001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0280/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : REFNI JUNIFWI BOUTI
NIM : E1116117
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 28 Juni 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamudin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DR. Darnawaty, S.Pd., M.Si
Sebagai : Pembimbing I
2. Nama : Fitrianti, SE, M.Ak
Sebagai : Pembimbing II

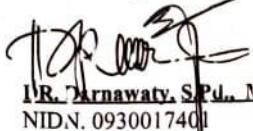
Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : REFNI JUNIFWI BOUTI
NIM : E1116117
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara

Setelah kami melakukan pengecekan kembali antara softcopy skripsi dari hasil pemeriksaan aplikasi Turnitin dengan hasil Similarity sebesar 34% oleh Tim Verifikasi Plagiasi di Pustikom dengan Skripsi Aslinya, isinya SAMA dan format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi.

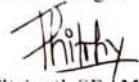
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.

Pembimbing I

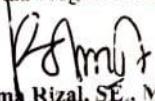

DR. Darnawaty, S.Pd., M.Si
NIDN. 0930017401

Gorontalo, Juni 2020

Pembimbing II


Fitrianti, SE, M.Ak
NIDN. 091129001

Mengetahui
Ketua Program Studi,


Rahma Rizal, SE, M.Ak
NIDN. 0914027902

kripsi_REFNI JUNIFWI BOUTI_E11.16.117_PENGARUH
KUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN
AERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
ORONTALO UTARA

ORIGINALITY REPORT

34%	34%	9%	25%
ORIGINALITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

media.neliti.com	8%
Internet Source	
www.scribd.com	4%
Internet Source	
www.surabaya.go.id	2%
Internet Source	
samryaazza.blogspot.com	2%
Internet Source	
journal.feb.unmul.ac.id	2%
Internet Source	
repository.widyatama.ac.id	1%
Internet Source	
www.kajianpustaka.com	1%
Internet Source	
jurnal.unsyiah.ac.id	1%
Internet Source	

1	id.scribd.com Internet Source	1 %
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
3	docobook.com Internet Source	1 %
4	noldysalindeho.blogspot.com Internet Source	1 %
5	bappenda.bogorkab.go.id Internet Source	1 %
6	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	1 %
7	jdih.lombokutarakab.go.id Internet Source	1 %
8	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
9	adoc.tips Internet Source	1 %
10	subbagiankelembagaananalisajabatan.wordpress.com Internet Source	1 %
11	www.sumberpengertian.co Internet Source	1 %
12	eprints.ung.ac.id	

	Internet Source	1 %
1	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
2	keuanganpamekasankab.com Internet Source	<1 %
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
4	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
5	researchleap.com Internet Source	<1 %
6	Submitted to STEI Tazkia Student Paper	<1 %
7	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
8	journal.stiem.ac.id Internet Source	<1 %
9	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %

Include quotes

On

Exclude matches

< 25 words